BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri perkebunan kelapa sawit mempunyai peran penting dalam kegiatan ekonomi Indonesia bahkan terus mengalami perkembangan dari tiap waktunya. Merujuk dari data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia di tahun 2024 mencapai 16,01 juta hektare dan menjadi luas areal tertinggi yang tercatat. Perkebunan kelapa sawit tersebut tersebar di 29 provinsi, dengan Provinsi Riau sebagai daerah dengan luas perkebunan terbesar, yaitu 3,37 juta hektare atau sekitar 21,05% dari luas perkebunan kelapa sawit nasional.

No	Provinsi *Province*	Perkebunan Besar Negara[1] *Government Estates[1]*		Perkebunan Besar Swasta[1] *Private Estates[1]*		Perkebunan Rakyat[2] *Smallholders[2]*		Jumlah[1,2] *Total[1,2]*	
		Luas *Area* (ha)	Produksi *Production* (ton)	Luas *Area* (ha)	Produksi *Production* (ton)	Luas *Area* (ha)	Produksi *Production* (ton)	Luas *Area* (ha)	Produksi *Production* (ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	31.043	96.415	184.016	488.163	268.189	508.134	483.248	1.092.712
2	Sumatera Utara	290.863	1.264.746	559.818	2.040.766	500.691	1.814.512	1.351.372	5.120.024
3	Sumatera Barat	7.115	26.517	180.738	670.077	256.926	714.043	444.779	1.410.636
4	Riau	74.862	358.906	999.766	3.201.082	2.296.796	5.576.113	3.371.424	9.136.101
5	Jambi	24.795	82.831	276.065	673.078	655.592	1.358.063	956.452	2.113.972
6	Sumatera Selatan	34.611	84.251	687.364	2.058.990	563.249	1.824.146	1.285.224	3.967.386
7	Bengkulu	519	1.811	95.777	259.191	332.921	1.037.164	429.217	1.298.165
8	Lampung	10.308	19.617	69.648	156.891	111.404	198.730	191.360	375.239
9	Bangka Belitung	–	–	161.146	630.621	104.099	229.617	265.246	860.238
10	Kepulauan Riau	–	–	6.189	22.974	1.011	1.212	7.200	24.186
11	DKI Jakarta	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Jawa Barat	11.254	40.512	4.259	5.809	342	433	15.854	46.753
13	Jawa Tengah	–	–	–	–	–	–	–	–
14	D I Yogyakarta	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Jawa Timur	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Banten	9.972	27.587	1.551	2.047	6.678	3.203	18.201	32.837
17	Bali	–	–	–	–	–	–	–	–
18	Nusa Tenggara Barat	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Nusa Tenggara Timur	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Kalimantan Barat	27.465	40.762	1.475.815	3.659.067	706.356	1.258.715	2.209.636	4.958.544
21	Kalimantan Tengah	–	–	1.743.581	6.362.165	403.502	1.095.978	2.147.083	7.458.143
22	Kalimantan Selatan	9.884	13.695	356.808	958.134	113.507	283.253	480.199	1.255.081
23	Kalimantan Timur	15.679	21.672	1.201.645	3.458.023	224.169	425.491	1.441.493	3.905.186
24	Kalimantan Utara	–	–	191.839	532.078	42.264	79.063	234.103	611.140
25	Sulawesi Utara	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Sulawesi Tengah	–	–	85.508	239.797	56.470	144.398	141.978	384.195
27	Sulawesi Selatan	9.889	25.035	1.526	3.274	47.462	105.191	58.877	133.500
28	Sulawesi Tenggara	1.314	1.603	48.803	56.167	21.396	17.696	71.512	75.466
29	Gorontalo	–	–	6.283	12.238	5.160	10.589	11.443	22.827
30	Sulawesi Barat	–	–	38.078	125.608	108.512	241.071	146.590	366.680
31	Maluku	–	–	9.342	22.051	802	279	10.144	22.330
32	Maluku Utara	–	–	5.555	20.139	–	–	5.555	20.139
33	Papua Barat	–	–	29.261	25.169	23.787	15.207	53.047	40.376
34	Papua Barat Daya	–	–	28.766	38.236	3.600	5.199	32.366	43.436
35	Papua	–	–	27.675	117.934	14.496	12.618	42.171	130.552
36	Papua Selatan	–	–	94.200	474.848	3.631	7.523	97.831	482.371
37	Papua Tengah	–	–	6.423	44.928	3.011	3.054	9.434	47.982
38	Papua Pegunungan	–	–	–	–	–	–	–	–
	INDONESIA	559.572	2.105.960	8.577.445	26.359.543	6.876.022	16.970.694	16.013.039	45.436.197

Gambar 1.1 Data Luas Areal dan Produksi Minyak Sawit Provinsi (Badan Pusat Statistik, 2025)

Merujuk dari Tabel 1.1, besarnya cakupan kegiatan perkebunan menyebabkan aktivitas operasional perusahaan menjadi semakin beragam dan membutuhkan pengelolaan sumber daya yang teratur. Salah satu kegiatan yang penting dalam mendukung operasional tersebut adalah pengelolaan bahan kimia. Bahan kimia digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pengendalian gulma, pemupukan, maupun pengendalian hama serta

penyakit tanaman. Agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik, pengeluaran bahan kimia perlu dilakukan sesuai kebutuhan, dicatat dengan jelas, dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan perusahaan.

Bahan kimia juga termasuk aset perusahaan yang memiliki nilai ekonomis dan memiliki risiko kehilangan, penyalahgunaan, maupun kesalahan pencatatan apabila tidak dikelola dengan baik (Saraswati, 2020). Oleh karena itu, perusahaan memerlukan pengendalian internal yang dapat memastikan bahwa setiap pengeluaran bahan kimia mempunyai dasar kebutuhan yang jelas, memperoleh persetujuan dari pihak yang mempunyai berwenang, serta dilengkapi dengan dokumen pendukung. Efektivitas pengendalian internal berkaitan dengan kejelasan pembagian tugas, penerapan aktivitas pengendalian, serta pelaksanaan *monitoring* secara konsisten (Yasmin & Harapan, 2025).

Pengendalian internal merupakan suatu mekanisme yang diterapkan dalam organisasi guna memastikan bahwasanya setiap kegiatan berjalan sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Penerapan mekanisme tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, menjaga keandalan informasi dalam pelaporan, serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai pada peraturan serta ketentuan yang berlaku. Dalam pengelolaan persediaan bahan kimia, salah satu bentuk pengendalian yang relevan adalah otorisasi sebelum barang dikeluarkan dari gudang. Mekanisme tersebut berfungsi sebagai bentuk verifikasi bahwa pengeluaran telah diketahui dan disetujui oleh pihak yang mempunyai kewenangan, sehingga transaksi dapat dipertanggungjawabkan (COSO, 2013).

Pada Gudang Begerpang Estate PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, pengeluaran bahan kimia dilaksanakan dengan menggunakan dokumen *Store Issue Voucher* (SIV). Dokumen tersebut menjadi bagian dari proses pengeluaran dan harus memperoleh persetujuan sesuai dengan kewenangan yang berlaku sebelum bahan kimia diserahkan oleh pihak gudang. Selain dokumen SIV, pencatatan persediaan juga didukung oleh penggunaan sistem *Systems, Applications, and Products in Data Processing* (SAP) serta kartu stok manual. Penerapan beberapa media tersebut

ditujukan untuk membantu memastikan bahwa transaksi pengeluaran dapat dicatat dan ditelusuri dengan baik.

Merujuk hasil dari observasi awal serta wawancara bersama *Godown Master* dan *Storekeeper*, secara umum proses pengeluaran bahan kimia sudah mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur) perusahaan. Namun, pada kondisi tertentu masih ditemukan dokumen *Store Issue Voucher* (SIV) yang belum lengkap ketika pengajuan pengeluaran bahan kimia dilakukan. Kondisi tersebut dapat terjadi karena administrasi dari Kerani Divisi belum selesai, *Manager Estate* sedang melaksanakan dinas luar sehingga persetujuan mengalami keterlambatan, atau terdapat kebutuhan bahan kimia yang bersifat insidental dan berada di luar jadwal pekerjaan.

Ketika kondisi tersebut terjadi, pihak gudang tidak langsung mengeluarkan bahan kimia. *Storekeeper* terlebih dahulu melakukan verifikasi dan koordinasi kepada KTU atau *Manager Estate* sebelum pengeluaran dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal di tingkat gudang tetap diterapkan. Namun, adanya proses verifikasi tambahan menyebabkan pengeluaran bahan kimia pada kondisi tertentu tidak dapat dilakukan secara langsung. Akibatnya, penerimaan bahan kimia oleh Kerani Divisi dapat mengalami keterlambatan dan berpotensi memengaruhi kegiatan operasional yang membutuhkan bahan kimia tepat waktu. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi guna mengetahui apakah pengendalian internal yang dilakukan sudah berjalan efektif sekaligus tetap mampu mencegah keterlambatan dalam proses pengeluaran bahan kimia.

Selain permasalahan yang ditemukan di lapangan, penelitian ini juga memiliki *research gap*. Hasil penelitian terkait penerapan pengendalian internal dalam kegiatan penerimaan serta pengeluaran barang menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian yang diterapkan telah terlaksana dengan baik serta mampu menunjang kelancaran pelaksanaan prosedur penerimaan dan pengeluaran barang. Namun, masih ditemukan beberapa kelemahan pada pelaksanaan prosedur sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dan pelatihan karyawan (Nurranto *et al*, 2023). Penelitian lainnya menunjukkan bahwasanya pengendalian internal yang diterapkan mampu

menunjang efektivitas pengelolaan persediaan melalui prosedur yang terstruktur dan pelaksanaan *stock opname* secara berkala (Winarno & Akbar, 2024). Namun, beberapa penelitian tersebut umumnya hanya berfokus kepada evaluasi pengendalian internal secara umum dan belum mengkaji secara khusus proses pengeluaran bahan kimia berdasarkan kondisi operasional aktual maupun menganalisis keterkaitan setiap tahapan proses secara menyeluruh.

Merujuk dari temuan terdahulu, bisa disimpulkan bahwasanya pengendalian internal berperan penting untuk mendukung efektivitas proses pengeluaran persediaan. Akan tetapi, penelitian sebelumnya belum mengintegrasikan analisis hubungan antarproses menggunakan *Deming's View of a Process System* serta pemetaan alur proses menggunakan *Process Mapping* dalam mengevaluasi efektivitas pengendalian internal pada proses pengeluaran bahan kimia. Selain itu, penelitian sebelumnya juga belum secara khusus mengevaluasi efektivitas mekanisme pengendalian internal dalam mengatasi keterlambatan proses pengeluaran bahan kimia yang disebabkan oleh keterlambatan kelengkapan dokumen administrasi maupun kondisi operasional tertentu. Oleh karena itu, dilakukannya penelitian ini guna memberi gambaran terkait proses aktual pengeluaran bahan kimia, mengevaluasi efektivitas pengendalian internal berdasarkan konsep *Production Viewed as a System*, serta memetakan alur proses pengeluaran bahan kimia untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dalam mendukung kelancaran proses pengeluaran persediaan bahan kimia.

Pendekatan *Deming's View of a Process System* digunakan karena proses pengeluaran persediaan bahan kimia terdiri atas beberapa tahapan yang saling berkaitan. Dalam penelitian ini, evaluasi difokuskan pada *Suppliers of Materials and Equipment, Receipt and Test of Materials, Storage, Packing, Inspection, Distribution,* dan *Consumers* sesuai dengan proses dan data yang diperoleh selama penelitian. Sementara itu, *Process Mapping* digunakan untuk menggambarkan alur proses pengeluaran bahan kimia berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pemetaan tersebut menunjukkan aktivitas yang dilakukan, pihak yang terlibat, dokumen yang

digunakan, serta titik pengendalian dalam proses pengeluaran. Melalui penggunaan kedua pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini bisa memberi gambaran secara jelas terkait pelaksanaan pengeluaran persediaan bahan kimia dan menemukan bagian proses yang masih membutuhkan perbaikan. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya *continuous improvement* terhadap pengendalian internal proses pengeluaran persediaan bahan kimia di Gudang Begerpang Estate PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, rumusan permasalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah ada proses yang tidak sesuai antara SOP perusahaan dengan proses pengeluaran persediaan secara aktual?
2. Bagaimana efektivitas pengendalian internal pada proses pengeluaran persediaan bahan kimia berdasarkan *Deming's View of a Process System?*
3. Perbaikan apa yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal pada proses pengeluaran persediaan bahan kimia?

1.3 Batasan Masalah

Untuk memastikan pelaksanaan penelitian tetap sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan, penelitian ini menetapkan beberapa batasan masalah di antaranya:

1. Penelitian dilakukan pada Gudang Begerpang Estate PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk.
2. Penelitian difokuskan pada proses pengeluaran bahan kimia yang meliputi tahapan permintaan, persetujuan, pengeluaran barang, dan pencatatan transaksi.
3. Evaluasi hanya membahas efektivitas pengendalian internal yang berkaitan dengan proses pengeluaran bahan kimia berdasarkan prosedur perusahaan.

4. Penelitian tidak mencakup proses pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan pemusnahan bahan kimia. Penelitian juga tidak membahas aspek keuangan, penilaian biaya persediaan, maupun evaluasi teknis terhadap sistem SAP.
5. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan dokumen perusahaan yang berkaitan dengan proses pengeluaran persediaan bahan kimia.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Mendeskripsikan proses pengeluaran persediaan bahan kimia di Gudang Begerpang Estate PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk. melalui *Process Mapping.*
2. Mengevaluasi efektivitas pengendalian internal pada proses pengeluaran persediaan bahan kimia menggunakan *Deming's View of a Process System.*
3. Merumuskan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal berdasarkan hasil evaluasi proses pengeluaran persediaan bahan kimia.

1.5 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat pada penelitian ini diantaranya:

1. Berharap penelitian ini bisa memberi manfaat berupa gambaran mengenai proses pengeluaran persediaan bahan kimia berdasarkan kondisi aktual di Gudang Begerpang Estate PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk. melalui *Process Mapping*, sehingga tahapan proses, pihak yang terlibat, dokumen yang digunakan, serta titik pengendalian dalam proses pengeluaran persediaan bahan kimia dapat diketahui secara lebih jelas.
2. Temuan ini juga diharapkan bisa memberi informasi terkait efektivitas pengendalian internal pada proses pengeluaran persediaan bahan kimia melalui penerapan *Deming's View of a Process System*. Evaluasi

tersebut dapat menunjukkan keterkaitan antar tahapan proses, kondisi pengendalian yang sudah berjalan, serta bagian proses yang masih memerlukan perhatian, khususnya pada aspek administrasi, persetujuan, dan verifikasi.

3. Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan dasar penyusunan rekomendasi perbaikan untuk menaikkan tingkat efektivitas pengendalian internal pada proses pengeluaran persediaan bahan kimia. Rekomendasi yang dihasilkan diarahkan pada peningkatan koordinasi administrasi, penyelesaian dan persetujuan *Store Issue Voucher* (SIV), verifikasi antarbagian, serta *monitoring* terhadap keterlambatan, sehingga proses pengeluaran dapat berlangsung lebih tepat waktu tanpa mengurangi mekanisme pengendalian internal yang telah diterapkan perusahaan.